



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Diplomasi Preventif ICRC dalam Penanganan Krisis
Kemanusiaan di Sudan Selatan

Skripsi

Oleh

Mutiara Christy

2016330263

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Diplomasi Preventif ICRC dalam Penanganan Krisis
Kemanusiaan di Sudan Selatan

Skripsi

Oleh

Mutiara Christy

2016330263

Pembimbing

Sukawarsini Djelantik, Ph.D.

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Mutiara Christy
Nomor Pokok : 2016330263
Judul Skripsi : Diplomasi Preventif ICRC dalam Penanganan Krisis
Kemanusiaan di Sudan Selatan

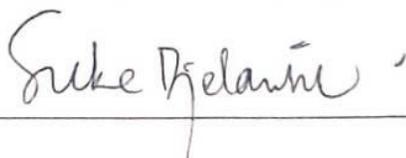
Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 20 Desember 2019
Dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

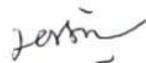
Ketua sidang merangkap anggota

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A. : 

Sekretaris

Sukawarsini Djelantik, Ph.D : 

Anggota

Jessica Martha S.IP., M.I.Pol. : 

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Christy

NPM : 2016330263

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Diplomasi Preventif ICRC dalam Penanganan Krisis
Kemanusiaan di Sudan Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya ataupun pendapat pihak lain yang dikutip, telah ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab, maka dari itu saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 13 Desember 2019

A yellow rectangular stamp with the text "METERAI TEMPEL" at the top, "25CFAHF181003100" in the middle, and "000" and "TIGA RIBU RUPIAH" at the bottom. A black ink signature is written across the stamp.

Mutiara Christy

Abstrak

Nama : Mutiara Christy
NPM : 2016330263
Judul : Diplomasi Preventif ICRC dalam Penanganan Krisis
Kemanusiaan di Sudan Selatan

Diplomasi preventif dinilai semakin signifikan untuk menghindari jatuhnya korban dan kerugian akibat kebijakan reaktif seperti intervensi militer. Signifikansi tersebut dimanfaatkan ICRC untuk melakukan diplomasi preventif dalam penanganan krisis kemanusiaan di Sudan Selatan. Tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan penelitian berupa, “bagaimana upaya diplomasi preventif ICRC dalam menangani krisis kemanusiaan di Sudan Selatan?” Penelitian ini menjelaskan latar belakang dan mekanisme kerja ICRC, serta dinamika, faktor penyebab, dan dampak dari krisis kemanusiaan di Sudan Selatan yang terjadi akibat perang saudara. Penelitian ini dikaji menggunakan metode penelitian kualitatif, dan analisisnya disusun dalam bentuk penelitian deskriptif. Eksplorasi makna dan interpretasi data dikaji menggunakan teori konstruktivisme, yang mempercayai bahwa ide, motivasi, budaya, dan identitas adalah komponen utama dalam mengkonstruksikan realitas manusia. Penelitian ini juga dilengkapi dengan konsep diplomasi preventif dan Organisasi Internasional sebagai aktor. Data primer yang digunakan adalah publikasi resmi ICRC. Sementara data sekundernya diperoleh dari buku, jurnal, laman berita resmi, serta laman resmi ICRC dan PBB. Penelitian ini menemukan bahwa diplomasi preventif ICRC berkontribusi dalam penanganan krisis kemanusiaan di Sudan Selatan dalam bentuk tujuh tahap, yaitu: mengafirmasi krisis kemanusiaan; menyatukan kepentingan ICRC dan PBB; mengevaluasi dan memproyeksikan tujuan akhir, membangun tingkat kepercayaan, merancang sistem peringatan dini, memberdayakan masyarakat sipil, dan memitigasi resiko. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuh tahap tersebut membuktikan efektivitas upaya diplomasi preventif ICRC dalam menangani krisis kemanusiaan di Sudan Selatan. Efektivitas tersebut terbukti karena ICRC berhasil melakukan diplomasi preventif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Sudan Selatan.

Kata Kunci : ICRC, Sudan Selatan, Diplomasi Preventif, Krisis Kemanusiaan

Abstract

Name : Mutiara Christy
NPM : 2016330263
Title : ICRC Preventive Diplomacy in Solving South Sudan
Humanitarian Crisis

Preventive diplomacy becomes more significant to prevent casualties and the cost of reactive policies such as military intervention. Those significancies are used by ICRC to execute preventive diplomacy in solving South Sudan humanitarian crisis. This paper aims to answer the research question, “how is the effort of ICRC preventive diplomacy in solving the South Sudan humanitarian crisis?” This paper explain the background and operational mechanism of ICRC, and discuss the dynamics, underlying factors, and the consequences of the humanitarian crisis in South Sudan, that caused by civil war. This research conducted by using the qualitative research method, and the analyses are arranged into the form of descriptive research. Exploration of *raison d'etre* and data interpretation are examined using constructivism theory, which believes that idea, motivation, culture, and identity are the sole component to construct human realities. This research also complemented by two concepts, which are diplomacy preventive, and International Organization as an actor. This research use ICRC official publications as primary data, while using books, journals, official news websites, with ICRC and UN official websites. This research found that ICRC preventive diplomacy in the South Sudan humanitarian crisis is using seven steps, that is: affirming humanitarian crisis; integrating ICRC and UN interest; evaluating and projecting the final aim; confidence-building measure; designing early warning system; empowering the civil society; and mitigating the risk. This research concludes that those seven steps are proving the effectiveness of ICRC preventive diplomacy in solving the South Sudan humanitarian crisis. The effectiveness is proven because ICRC success in delivering preventive diplomacy that are relevant to the needs of South Sudanese.

Key Words : ICRC, South Sudan, Preventive Diplomacy, Humanitarian Crisis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan anugerah-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penelitian akhir ini yang berjudul “Diplomasi Preventif ICRC dalam Penanganan Krisis Kemanusiaan di Sudan Selatan.”

Selama menyelesaikan penelitian akhir ini penulis mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Dra. Sukawarsini Djelantik selaku dosen pembimbing skripsi, atas segala waktu dan arahnya bagi penulis dalam merampungkan penelitian ini. Secara khusus penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penelitian akhir ini.

Meski demikian, penulis menyadari bahwa penelitian akhir ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis berharap penelitian akhir ini akan mendapatkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembacanya, agar mampu membantu penulis dalam menyempurnakan penelitian-penelitian berikutnya.

Bandung, 13 Desember 2019

Penulis

***“Our real enemy is not the neighbouring nation;
it’s hunger, cold, poverty, ignorance, routine, superstition, and prejudice.”***

Henry Dunant, founder of ICRC

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------|-----|
| Surat Pernyataan | i |
| Abstrak | ii |
| <i>Abstract</i> | iii |
| Kata Pengantar..... | iv |
| Daftar Isi..... | vi |
| Daftar Gambar | ix |
| Daftar Istilah..... | x |

BAB I

| | |
|--|----|
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 6 |
| 1.2.1 Pembatasan Masalah | 9 |
| 1.2.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian..... | 10 |
| 1.3.2 Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| 1.4 Kajian Literatur | 10 |
| 1.5 Kerangka Pemikiran..... | 15 |
| 1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data..... | 20 |
| 1.6.1 Metode Penelitian..... | 23 |
| 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data..... | 23 |
| 1.7 Sistematika Pembahasan | 24 |

BAB II

DIPLOMASI PREVENTIF

| | |
|---|-----------|
| KOMITE PALANG MERAH INTERNASIONAL (ICRC) | 26 |
| 2.1. Sejarah ICRC | 27 |
| 2.2. Legalitas dan Identitas ICRC | 32 |
| 2.3. Mandat dan Misi ICRC | 33 |
| 2.4. Prinsip-Prinsip Operasional ICRC | 35 |
| 2.5. Struktur dan Fungsi Organisasi ICRC..... | 37 |
| 2.6. Cakupan Operasional dan Prioritas ICRC | 40 |
| 2.7. Pendanaan dan Anggaran ICRC | 42 |
| 2.8. Strategi ICRC..... | 44 |
| 2.9. Implementasi Diplomasi Preventif ICRC..... | 45 |
| 2.10. Diplomasi Kemanusiaan ICRC..... | 49 |

BAB III

| | |
|--|-----------|
| KRISIS KEMANUSIAAN SUDAN SELATAN | 53 |
| 3.1. Kondisi Geografis dan Demografi Sudan Selatan | 54 |
| 3.2. Perang Saudara dan Faktor Penyebab Krisis Kemanusiaan Sudan Selatan | 56 |
| 3.2.1. Kronologi Perang Saudara Pasca Kemerdekaan | 56 |
| 3.2.2. Faktor Utama: Perebutan Kekuasaan Politik | 69 |
| 3.2.3. Faktor Pendukung: Keterbatasan oleh Budaya | 72 |
| 3.3. Dampak Perang Saudara di Sudan Selatan..... | 78 |

BAB IV

UPAYA DIPLOMASI PREVENTIF ICRC DALAM MENANGANI

| | |
|--|-----------|
| KRISIS KEMANUSIAAN DI SUDAN SELATAN | 81 |
| 4.1. Mengafirmasi Krisis Kemanusiaan | 83 |

| | |
|---|-----|
| 4.2. Menyatukan Kepentingan ICRC dengan PBB | 87 |
| 4.2.1. Menghimbau PBB dan Negara-Negara Regional Afrika | 88 |
| 4.2.2. ICRC dan PBB Membuka Jalur Komunikasi bagi Pengungsi..... | 90 |
| 4.3. Mengevaluasi dan Memproyeksikan Tujuan Akhir | 92 |
| 4.4. Membangun Tingkat Kepercayaan (<i>Confidence Building Measure</i>) | 95 |
| 4.5. Merancang Sistem Peringatan Dini..... | 97 |
| 4.6. Memberdayakan Masyarakat Sipil..... | 100 |
| 4.7. Membangun Mitigasi Resiko..... | 104 |

BAB V

| | |
|-------------------------|------------|
| KESIMPULAN | 108 |
|-------------------------|------------|

| | |
|----------------------|-----|
| Daftar Pustaka | 112 |
|----------------------|-----|

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1. Struktur Organisasi ICR..... | 39 |
| Gambar 3.1. Peta Sudan Selatan..... | 55 |
| Gambar 3.2. Peta Persebaran Kelompok Etnis Sudan Selatan..... | 74 |
| Gambar 4.1. Peta Kehadiran ICRC di Sudan Selatan..... | 84 |
| Gambar 4.2. Kerangka Kerja Pembangunan Berkelanjutan oleh ICRC..... | 94 |

DAFTAR ISTILAH

| | |
|--------|---|
| AAP | : <i>Accountability to Affected People</i> |
| AUPSC | : <i>African Union Peace and Security Council</i> |
| CBM | : <i>Confidence Building Measure</i> |
| CBP | : <i>Community Based Protection</i> |
| CPA | : <i>Comprehensive Peace Agreement</i> |
| DK | : Dewan Keamanan |
| EITC | : <i>Everton In The Community</i> |
| HHI | : Hukum Humaniter Internasional |
| ICRC | : <i>International Committee of the Red Cross</i> |
| IGAD | : <i>Intergovernmental Authority for Development</i> |
| ISIS | : <i>Islamic State in Iraq and Syria</i> |
| JMEC | : <i>Joint Monitoring and Evaluation Committee</i> |
| KBG | : Kekerasan Berdasarkan Gender |
| MEPA | : <i>Middle East Psychological Association</i> |
| MU | : Majelis Umum |
| NLC | : <i>National Liberation Council</i> |
| OI | : Organisasi Internasional |
| OINP | : Organisasi Internasional Non Pemerintah |
| ONP | : Organisasi Non Pemerintah |
| PBB | : Persatuan Bangsa-Bangsa |
| SAF | : <i>Safer Access Framework</i> |
| SPLA | : <i>South Sudan People Liberation Army</i> |
| SPLM | : <i>South Sudan People Liberation Movement</i> |
| SSEHSP | : <i>South Sudan Essential Healthcare Support Project</i> |
| SSOA | : <i>South Sudan Opposition Alliance</i> |

UA : Uni Afrika
UE : Uni Eropa
UNMISS : *United Nations Mission In South Sudan*
WB : *World Bank*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kondisi politik dunia yang interdependen, tingkat ketidakpastian dan instabilitas politik nasional semakin meningkat. Interdependensi ini sebagian besar dipicu oleh berkembangnya sistem politik demokratis, ketergantungan negara-negara dalam memenuhi kebutuhan sumber daya, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.¹ Negara-negara terpaksa bergantung satu sama lain, mengakibatkan dinamika interaksi antar negara terus berubah dengan cepat dan drastis. Perubahan drastis yang terjadi terus menerus dalam hubungan interdependen, membuat diplomasi sebagai proses dan alat untuk menjembatani kepentingan aktor-aktor internasional menjadi semakin signifikan.

Sejak Kongres Wina pada abad 18, diplomasi pada umumnya dikenal sebagai serangkaian praktik negosiasi oleh duta besar dan perwakilan negara (*ambassador and envoys*) sebagai bentuk manajemen hubungan internasional.² Negara dianggap sebagai pemain tunggal dalam proses negosiasi antar negara. Diplomat sebagai perwakilan negara berfokus pada tugas representasi, negosiasi, pengumpulan atau penyebaran

¹ Waheeda Rana, "Theory of Complex Interdependence: A Comparative Analysis of Realist and Neoliberal Thoughts," *International Journal of Business and Social Science* volume 6, no. 2 (2015): 290.

² Sir Harold George Nicholson, *diplomacy* (Oxford: Oxford University Press, 1950): 13.

informasi,³ serta hal-hal yang menyangkut rahasia negara. Pada periode tersebut, pemahaman bahwa pelaksanaan diplomasi terbatas pada aktor pemerintah sangat dipengaruhi oleh fenomena-fenomena perang di Eropa.⁴

Didirikannya Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920, dan berakhirnya peristiwa Perang Dunia II berhasil memberi nilai baru pada diplomasi.⁵ Kedua peristiwa tersebut membawa diplomasi pada era keterbukaan. Apabila sebelumnya diplomasi penuh dengan kecurigaan, kompetisi, dan niat destruktif untuk menjatuhkan negara lain; di periode tersebut diplomasi mulai dilaksanakan untuk saling memberi keuntungan bagi negara-negara yang terlibat. Didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, negara-negara mulai menyadari pentingnya bekerja sama untuk perbaikan dunia secara keseluruhan dan mengembangkan semangat persatuan antar negara.

Keterbukaan dalam politik internasional ternyata mendatangkan tantangan baru bagi diplomasi di abad 21. Kemunculan globalisasi menandakan keterkaitan masalah nasional satu negara dengan negara lain karena perkembangan manusia dan masyarakat dibentuk melalui fenomena-fenomena kontemporer yang melampaui batasan geografis, perbedaan waktu, dan budaya.⁶ Negara sebagai sebuah institusi yang terbiasa menyelesaikan masalah melalui tata administrasi yang kaku, mengalami kesulitan untuk merespon masalah dengan cara bekerja sama (bukan memberikan perintah) dengan aktor lain yang berada di atas maupun di bawah jajaran pemerintah nasional.

³ Brian Hocking, "Futures for diplomacy: Integrative Diplomacy in the 21st Century," *Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'*, (2012): 27.

⁴ Halvard Leira, *A Conceptual History of Diplomacy* (Sage Publications, 2016): 32.

⁵ *Ibid.*, hlm. 35.

⁶ Richard Langhorne, "History and the Evolution of Diplomacy," *Modern Diplomacy* (1998): 58.

Organisasi Internasional (OI) sebagai aktor internasional akibatnya memiliki peran yang semakin signifikan dalam diplomasi dan politik internasional. Setidaknya lebih dari 238 OI telah bekerja dalam berbagai isu global.⁷ Organisasi-organisasi ini tidak bekerja untuk sekedar merancang perjanjian internasional, tetapi mereka memiliki otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan hingga objek terkecil dalam masyarakat. Contohnya seperti IMF dan keahliannya dalam memproyeksikan perekonomian dunia, mampu membuat intervensi kebijakan ekonomi nasional menjadi hal yang lumrah. IMF berhasil memengaruhi penyusunan anggaran nasional, konfigurasi sektor bisnis, dan pasar domestik secara keseluruhan.⁸

Tidak hanya OI, aktor non-negara seperti individu telah memainkan peran signifikan dalam politik internasional karena pengaruhnya yang besar dalam isu-isu spesifik. Contohnya seperti Nadia Murad, seorang wanita dari etnis Yazidi yang menjadi korban penculikan dan pemerkosaan oleh tentara *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS) di Irak.⁹ Pada tahun 2014, tiga bulan pasca penculikan, Nadia berhasil kabur dan berlindung di tempat pengungsian. Sejak saat itu, dia bertekad untuk menceritakan kisah perjuangannya kepada dunia dan berharap agar tentara-tentara tersebut mendapat hukuman yang setimpal. Sejak 2015, Nadia telah menjadi tamu dalam sejumlah panel PBB, menyelesaikan buku berjudul “*The Last Girl: My Story of Captivity, and My Fight Against The Islamic State*,” kemudian terus mengadvokasi,

⁷ Michael Barnett and Martha Finnemore, *Rules for the World: International Organizations in World Politics* (Cornell University Press, 2004): 1.

⁸ *Ibid.*, hlm. 45.

⁹ Nadia Murad, *The Last Girl: My Story of Captivity, and My Fight Against The Islamic State* (Tim Duggan Books, 2017).

mendampingi, dan membantu wanita dan anak-anak di Irak yang mengalami hal-hal serupa.¹⁰ Berkat kegigihan dalam memperjuangkan haknya, Nadia meraih penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2019.¹¹ Melalui penghargaan tersebut, Nadia mendapatkan panggung yang lebih besar untuk melobi pemangku kebijakan agar proses peradilan anggota ISIS dipastikan berjalan, dan keamanan wanita juga anak-anak terus diprioritaskan dalam konflik bersenjata.

Telah terbukti bahwa isu non-tradisional dan aktor non-negara berperan besar dalam dinamika politik internasional terkini, sehingga keberadaan diplomasi sebagai rangkaian proses sentral kebijakan pemerintah semakin memerlukan proses re-evaluasi secara konstan.¹² Komunitas internasional semakin leluasa dalam mempertanyakan apakah dengan berubahnya isu yang dihadapi dan beragamnya aktor yang berperan, alat dan instrumen diplomasi yang digunakan masih mencukupi untuk merespon perubahan tersebut.¹³ Salah satu momen penting yang menandakan diplomasi telah beradaptasi dengan kebutuhan dunia yang interdependen adalah dengan munculnya diskursus diplomasi preventif.

Dalam praktiknya, diplomasi preventif dipercaya sebagai infrastruktur perdamaian. Diplomasi preventif berkembang dari gagasan bahwa diperlukannya diplomasi untuk mencegah konflik, sekaligus membatasi konflik yang ada agar tidak

¹⁰ Kiran Nazish, "Nobel Laureate Nadia Murad Taught Me the True Meaning of Courage," *time.com*, diakses 28 oktober 2019, <https://time.com/5417220/nadia-murad-nobel-prize-courage/>

¹¹ "Nadia Murad: Facts," *nobelprize.org*, diakses 29 oktober 2019, <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2018/murad/facts/>

¹² Hocking, Brian., op. cit.

¹³ Steven A. Zyck dan Robert Muggah, "Preventive Diplomacy and Conflict Prevention: Obstacles and Opportunities," *Stability: International Journal of Security & Development* volume 1, no. 1 (2012): 69.

berlanjut ke tahap yang lebih destruktif.¹⁴ Gagasan tersebut dianggap relevan untuk merespon fenomena-fenomena konflik dan kekerasan di abad 21 yang didominasi oleh pola-pola kerja tertentu. Contohnya dalam kasus kejahatan kriminal trans-nasional atau kelompok teroris.¹⁵ Kelompok tersebut tidak melakukan kejahatan berdasarkan momen intuitif, melainkan berdasarkan waktu dan tahapan kerja yang dirancang dalam jangka waktu panjang. Tindakan preventif membantu pemangku kebijakan untuk merespon masalah yang belum terjadi (tetapi mungkin akan terjadi) dengan memahami pola kerja dari aktor-aktor terlibat.

Sifat alami pencegahan yang berkaitan erat dengan norma membuat kehadiran lembaga, organisasi, dan komunitas domestik menjadi komponen penting untuk memberikan pandangan kontekstual dalam bernegosiasi. Unit kerja yang dirancang dari elemen terdekat masyarakat, baik formal maupun informal, akan menguatkan kemampuan mendeteksi masalah dari tingkat akar rumput.¹⁶ Aktor domestik yang sangat beragam secara unik membangun sistem dan kemitraan baru, namun pada saat yang sama memperkuat dan membantu mentransformasi aktor yang telah ada sebelumnya.¹⁷ Akibatnya, dinamika antar aktor menghasilkan progres secara konstan.

Kemampuan diplomasi preventif untuk digunakan dalam berbagai level permasalahan dan didukung oleh berbagai aktor non-pemerintah dan aktor domestik,

¹⁴ Zyck dan Muggah, op. cit., hlm. 68.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid., hlm. 70.

¹⁷ Thomas G. Weiss, "The Rise of Non-State Actors in Global Governance : Opportunities and Limitations," *One Earth Future Foundation Discussion Paper* (2013): 5.

menjadi topik yang signifikan untuk dipelajari lebih lanjut karena secara tidak langsung diplomasi preventif adalah investasi penyelesaian konflik kontemporer di masa depan.

1.2. Identifikasi Masalah

Terdapat dua masalah yang teridentifikasi dalam topik penelitian ini. Pertama, dibutuhkan Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) yang netral dan imparial untuk meningkatkan kapasitas Organisasi Non-Pemerintah (ONP) lokal di Sudan Selatan. Dalam konteks Sudan Selatan yang telah mengalami perang saudara selama lebih dari lima tahun, idealnya ONP perlu berperan lebih aktif dibandingkan OINP agar menumbuhkan rasa kepemilikan dan kepercayaan antar sesama masyarakat, sehingga akhirnya mencegah masyarakat jatuh dalam konflik dan perpecahan yang serupa dimasa depan¹⁸.

Namun kenyataannya hingga tahun 2017, setidaknya 90% dana bantuan untuk Sudan Selatan dialokasikan untuk OINP, sementara hanya 4,3% dari dana tersebut yang diberikan pada ONP lokal.¹⁹ Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa banyak pendonor kurang mempercayai kapasitas ONP lokal, sehingga mayoritas dana bantuan yang diperoleh ONP lokal harus melalui organisasi perantara seperti OINP yang lebih dipercayai oleh pendonor. Maka dari itu, keberadaan OINP yang netral dan imparial sangat dibutuhkan untuk meningkatkan performa ONP lokal secara keseluruhan. OINP yang selama ini dipercaya atas peran-peran penting, perlu memprioritaskan penguatan

¹⁸ Erol Yayboke, "Accessing South Sudan: Humanitarian Aid in a Time of Crisis," *CSIS Briefs* (2018), diakses 23 Februari 2019, <https://www.csis.org/analysis/accessing-south-sudan-humanitarian-aid-time-crisis>

¹⁹ HPG Overseas Development Institute, "Funding to Local Humanitarian Actors," *Humanitarian Policy Group Report* (2018): vii.

ONP lokal yang bergerak lebih dekat dengan masyarakat akar rumput. Contohnya, OINP diharapkan membantu ONP lokal mengimplementasikan mekanisme bantuan yang lebih netral dan imparisial, misalnya dengan cara merekrut sukarelawan dari berbagai etnis.²⁰ Namun yang terutama, dalam jangka panjang, OINP diharapkan membantu ONP lokal untuk berkontribusi dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dalam ranah bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan.²¹

Kedua, kurangnya dukungan lembaga dan bantuan untuk memulihkan masyarakat dalam konflik. Pemulihan tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan menghubungkan keluarga (*restoring family links*) bagi seluruh penduduk dan pengungsi dari Sudan Selatan. Memulihkan dan atau menjaga hubungan keluarga dalam situasi konflik bersenjata adalah salah satu agenda kemanusiaan, sebagai bentuk implementasi perlindungan terhadap martabat dan Hak Asasi Manusia (HAM).²² Agenda tersebut bertujuan untuk mencegah terpisahnya atau menghilangnya anggota keluarga, menjaga kontak antara keluarga yang terpisah, dan mengklarifikasi status dan keberadaan anggota keluarga.²³ Namun sayangnya agenda pemulihan dan pemberdayaan masyarakat masih jarang diperhatikan dan tidak mendapatkan dukungan sebanyak agenda kemanusiaan lain seperti pemberian bantuan logistik atau

²⁰ Lydia Tanner, Leben Moro, Hafeez Wani, dan Zvidzai Maburutse, "National Actors in South Sudan," *Humanitarian Practice Network*, diakses 23 Oktober 2019, <https://odihpn.org/magazine/national-actors-in-south-sudan/>

²¹ Nick Helton dan Ivor Morgan, "Maintaining NGO space in South Sudan: the importance of independent NGO coordination in complex operating environments," *Humanitarian Practice Network*, diakses 23 Oktober 2019, <https://odihpn.org/magazine/maintaining-ngo-space-in-south-sudan-the-importance-of-independent-ngo-coordination-in-complex-operating-environments/>

²² International Committee of the Red Cross, "Restoring Family Links Strategy," *ICRC Strategy Reference* (2009): 13.

²³ The Family Links Network, "Restoring Family Links," *familylinks.icrc.org*, diakses 23 Oktober 2019, <https://familylinks.icrc.org/en/Pages/HowWeWork/How-we-work.aspx>

perbaikan infrastruktur. Dalam hal penggalangan dana, agenda pemulihan dan pemberdayaan pun tergolong isu yang paling jarang diperhatikan oleh para pendonor.²⁴

Pada kasus krisis kemanusiaan Sudan Selatan, lebih dari empat juta orang telah menjadi pengungsi²⁵. Kurangnya dukungan pemulihan dan pemberdayaan menjadi masalah signifikan karena tanpa hubungan keluarga yang pulih, akan meningkatkan kerentanan masyarakat pada komunitasnya sendiri. Keluarga dalam situasi konflik adalah pilar terdekat untuk memberi kekuatan dalam menghadapi kondisi sulit, maka dengan menjaga hubungan baik akan mencegah munculnya bibit-bibit kebencian dan konflik serupa dikemudian hari. Keberadaan lembaga dan donor perlu difokuskan untuk membantu seluruh penduduk dan pengungsi yang kehilangan dan atau terpisah dengan keluarganya agar mereka bisa menerima kejadian yang mereka alami, pulih, dan melanjutkan kehidupan mereka menuju normal.²⁶

Dari sejumlah Organisasi Internasional (OI) yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, keberadaan *International Committee of Red Cross* (ICRC) sangat dipercaya untuk mengisi peran-peran yang dibutuhkan dalam kondisi krisis kemanusiaan seperti di Sudan Selatan. ICRC sebagai salah satu organisasi kemanusiaan dengan jaringan kerja luas yang tersebar hampir di seluruh benua

²⁴ Central Training Agency for ICRC, "Restoring Family Links Strategy for the International Red Cross and Red Crescent Movement (2008-2018)," *Progress Report of Council of Delegates* (2015): 13.

²⁵ UNHCR: The UN Refugee Agency, "South Sudan: Africa's Largest Refugee Crisis," *laman resmi UNHCR*, diakses 30 September 2019, <https://www.unhcr.org/news/videos/2018/12/5c18ef1f4/south-sudan-africas-largest-refugee-crisis.html>

²⁶ International Committee of the Red Cross, "South Sudan: One Year After Peace Deal, Violence and Humanitarian Needs Haven't Decreased," *icrc.org*, diakses 22 Oktober 2019, <https://www.icrc.org/en/document/south-sudan-one-year-after-peace-deal-violence-and-humanitarian-needs-havent-decreased>

memungkinkan ICRC untuk memperkuat ONP lokal, dan memulihkan hubungan keluarga dari korban krisis kemanusiaan tersebut.

1.2.1. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada upaya-upaya diplomasi preventif oleh ICRC dalam menangani krisis kemanusiaan di Sudan Selatan. Pertama, penelitian ini terbatas pada upaya-upaya oleh aktor ICRC, mengingat signifikansinya sebagai organisasi kemanusiaan pertama dibawah Konvensi Jenewa yang memiliki mandat untuk menjadi garda terdepan dalam perlindungan Hukum Humaniter Internasional (HHI).²⁷ Mandat tersebut membuat ICRC menjadi aktor yang strategis dan proaktif dalam penegakkan HHI. Kedua, penelitian ini fokus pada krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan Selatan, karena dampaknya menjadi krisis pengungsi terbesar di Afrika.²⁸ Fokus pada Sudan Selatan sangat krusial untuk mencegah efek domino yang telah terjadi agar tidak berlangsung semakin lama. Ketiga, penelitian ini terbatas pada periode waktu pasca kemerdekaan Sudan Selatan pada 9 Juli 2011 hingga 31 Oktober 2019. Titik awal penelitian yang bertepatan dengan kemerdekaan Sudan Selatan menjadi periode waktu yang tepat untuk mengkaji perkembangan krisis kemanusiaan Sudan Selatan sejak berdirinya negara tersebut. Batas akhir penelitian ini bersamaan dengan momen pertemuan Presiden Salva Kiir dan wakilnya, Riek Machar pada 31 Oktober 2019. Pertemuan tersebut adalah pertemuan pertama Kiir dan Machar pasca perjanjian damai

²⁷ International Committee of Red Cross, "ICRC its mission and work," *ICRC Policy Reference* (2009): 3.

²⁸ "South Sudan: Africa's Largest Refugee Crisis," *op. cit.*

yang telah ditandatangani tertunda selama satu tahun.²⁹ Akhir penelitian ini berhenti pada pertemuan tersebut karena pertemuan tersebut menunjukkan tanda-tanda keberhasilan upaya mediasi oleh berbagai pihak.

1.2.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana upaya-upaya diplomasi preventif ICRC dalam menangani krisis kemanusiaan di Sudan Selatan?”

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya-upaya diplomasi preventif ICRC dalam menangani krisis kemanusiaan di Sudan Selatan.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dalam bidang diplomasi preventif dan penanganan krisis kemanusiaan.

1.4. Kajian Literatur

Referensi pertama berasal dari dokumen resmi oleh ICRC berjudul “*Prevention Policy*,” yang berisi panduan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan preventif dibawah payung hukum ICRC. Panduan tersebut mencakup definisi, tujuan, batasan,

²⁹ Beatice Mategwa, “Kiir and Machar Meet in What’s Seen as ‘Commitment to Peace’,” *laman resmi UNMISS*, diakses 30 september 2019, <https://unmiss.unmissions.org/kiir-and-machar-meet-what%E2%80%99s-seen-%E2%80%98commitment-peace%E2%80%99>

prinsip, syarat, dan strategi dari tindakan preventif ICRC. ICRC berargumen, bahwa sebagai organisasi dalam bidang kemanusiaan yang memiliki misi melindungi hidup dan martabat korban konflik bersenjata dan kondisi kekerasan, tindakan pencegahan wajib diprioritaskan³⁰ karena tidak akan ada tindakan retaliasi yang sepadan apabila manusia (khususnya masyarakat sipil) harus meninggal dalam kondisi seperti itu.

Banyak gagasan yang dikembangkan ICRC dalam ranah bantuan kemanusiaan, dipengaruhi oleh kompetisi ICRC dengan organisasi kemanusiaan lain demi menjaga relevansi dan kualitas institusi mereka³¹ sesuai dengan kebutuhan tata kelola global terkini. Bagi ICRC, tindakan pencegahan melalui diplomasi preventif bukanlah pilihan, melainkan tanggung jawab yang harus diemban bersama. Melalui komitmen sukarela, ICRC mampu membuat konsep diplomasi preventif menjadi standar yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti tindakan preventif ICRC pada tahun 2007 di Lebanon, ketika ICRC membuka dan menjaga kontak melalui jalur komunikasi Palang Merah agar masyarakat Lebanon mampu berkomunikasi dengan keluarganya yang terpisah di Israel maupun Palestina.³² Tindakan tersebut berhasil dilakukan semata-mata karena kedudukan ICRC sebagai aktor yang netral dan imparial, sehingga tindakannya tidak dinilai tendensius oleh pemerintah terlibat. Meski demikian, dalam praktiknya, diplomasi preventif masih membutuhkan lebih banyak

³⁰ International Committee of the Red Cross, "ICRC Prevention Policy," *ICRC Policy Reference* (2010): 3.

³¹ Phillipe Régnier, "The emerging concept of humanitarian diplomacy: identification of a community of practice and prospects for international recognition," *International Review of the Red Cross* volume 93, no. 84 (2011): 1232.

³² ICRC, "Summary Report: Aafghanistan, Colombia, Democratic Republic of The Congo, Georgia, Haiti, Lebanon, Liberia and The Philippines," *Ipsos and ICRC Opinion Survey* (2009): 14.

koordinasi dan sinergi, karena setiap organisasi memiliki prioritas yang berbeda³³ dalam menjalankan diplomasi preventif.

“Semua aktor memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam menjamin pendampingan dan perlindungan bagi populasi yang rentan. Kesalahan suatu pihak tidak serta merta menghentikan kewajiban pihak lain. Pendampingan dan perlindungan bukanlah hak prerogatif eksklusif satu pihak, baik negara, aktor non-negara, mau pun organisasi multilateral.”³⁴

Dokumen kebijakan ICRC ini berhasil menjelaskan bagaimana diplomasi preventif merupakan tanggung jawab masyarakat global untuk memahami, mengadvokasi, dan mendukung pencegahan sesuai kapasitasnya masing-masing. Sebagai contoh, ICRC berhasil menjalankan diplomasi preventif di Kolombia dengan mengasistinsi 1,1 juta penduduk yang menjadi pengungsi internal dalam tiga sampai enam bulan pertama. Asistensi tersebut dilakukan dengan cara mendampingi, memberi bantuan, serta menjaga dialog dengan aktor domestik Kolombia sesuai kapasitasnya.³⁵ Pencegahan sesuai kapasitasnya menggerakkan roda sinergi untuk saling melengkapi upaya aktor satu dengan yang lain.

Literatur kedua merupakan publikasi resmi oleh PBB yang berjudul “*UN Preventive Diplomacy: Policy Paper and Case Studies*.”³⁶ Dokumen ini secara umum menjabarkan kesuksesan diplomasi preventif PBB dalam sejumlah studi kasus,

³³ ICRC, “ICRC Prevention Policy,” hlm. 9.

³⁴ Peter Maurer, “Humanitarian diplomacy and principled humanitarian action,” *pidato resmi presiden ICRC* (2014): 450.

³⁵ “Summary Report, Aafghanistan, Colombia, Democratic Republic of The Congo, Georgia, Haiti, Lebanon, Liberia and The Philippines,” *op. cit.*

³⁶ United Nations University, “UN Preventive Diplomacy: Policy Paper and Case Studies,” *UN University Center for Policy Research* (2018).

diantaranya: Guinea, Lebanon, Malawi, Nigeria, Sudan, dan Yaman.³⁷ Argumen utamanya adalah kurangnya pemahaman mengenai diplomasi preventif, karena aktor internasional terlalu fokus mencari penyebab kegagalan. Masyarakat internasional kesulitan untuk memperbaiki tindakan pencegahan karena belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai seperti apa kasus diplomasi preventif yang berhasil dan apa saja faktor-faktor pendukungnya.³⁸ Dokumen ini mengkaji kesuksesan, memberikan landasan bagi penilaian performa diplomasi preventif, dan memberikan ide-ide pembaruan dalam perencanaan diplomasi preventif.

Dalam studi kasus di Malawi, dijelaskan pentingnya dua kategori aktor untuk terlibat dalam diplomasi preventif. Aktor pertama adalah pihak yang berkonflik, sementara aktor kedua adalah pihak eksternal konflik yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan.³⁹ Dokumen ini menggarisbawahi signifikansi keputusan-keputusan yang diambil pihak berkonflik dibandingkan upaya-upaya oleh pihak yang berpengaruh. Dalam diplomasi preventif, sebesar apapun dampak yang dibawa oleh aktor kedua, penentu dari kesuksesan diplomasi preventif tersebut ialah tetap pihak yang berkonflik.⁴⁰ Apabila pihak berkonflik tetap melanjutkan baku tembak, maka pengaruh dan upaya diplomasi oleh aktor kedua tetap gagal.

Literatur ketiga berjudul “*South Sudan: a Slow Liberation*” oleh Edward Thomas⁴¹ yang membahas perjuangan Sudan Selatan dalam mengatasi konflik nasional

³⁷ United Nations University, op. cit., hlm. 4.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid. hlm. 62.

⁴⁰ United Nations University, op. cit., hlm. 70.

⁴¹ Edward Thomas, *South Sudan: a Slow Liberation*, (Zed Books Ltd, 2015).

dan permasalahan pembangunan yang tidak merata. Studi kasusnya difokuskan di wilayah kota Jonglei, yang dianggap mampu menggambarkan pola-pola kekerasan dan marginalisasi di Sudan Selatan.⁴² Thomas berargumen bahwa kemerdekaan Sudan Selatan dan konflik setelahnya, berkaitan erat dengan proses historis yang ditempuh melalui sejumlah perang lokal, nasional, dan internasional, bersamaan dengan krisis ekonomi lokal dan global.⁴³

Krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh perang saudara di Sudan Selatan memiliki spektrum permasalahan yang sangat luas.⁴⁴ Berawal dari perebutan kekuasaan diantara Presiden Salva Kiir Maryadit dan Wakil Presiden Riek Machar,⁴⁵ mengakibatkan munculnya konflik bersenjata dan perpecahan etnis di berbagai negara bagian di Sudan Selatan.⁴⁶ Thomas lebih lanjut menjelaskan bahwa keterkaitan pelik antara satu aspek dan lainnya membuat manajemen konflik menghadapi banyak kendala. Pada akhirnya, banyak penyelesaian masalah yang masih bersifat darurat atau sementara. Contohnya seperti bantuan kebutuhan pokok yang diberi oleh pihak eksternal. Tercatat kurang lebih satu juta dolar yang dikirim setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan primer korban krisis.⁴⁷ Alokasi dana yang tergolong besar ini mencerminkan keinginan masyarakat global untuk menyelesaikan masalah ini sesegera

⁴² Thomas, Edward., op. cit., hlm. 17.

⁴³ Ibid. hlm. 279.

⁴⁴ Lauren Hutton, "South Sudan From Fragility at Independence to a Crisis of Sovereignty," *Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'*, (2014): 8.

⁴⁵ C. Koos & T. Gutschke, "South Sudan Newest's War: When Two Old Men Devide a Nation" *German Institute of Global and Area Studies*, no 2 (2014): 2-3.

⁴⁶ Tony Firman, "Sudan Selatan, Negara Baru yang Terus Bergejolak," *Tirto.id*, diakses 10 Februari 2019, <https://tirto.id/sudan-selatan-negara-baru-yang-terus-bergejolak-cqJz>

⁴⁷ Maurer, Peter., op. cit.

mungkin. Dalam situasi seperti inilah seharusnya diplomasi preventif dieksploitasi untuk menjadi strategi dari penyelesaian dan sekaligus pencegahan konflik.

Melalui tiga literatur di atas, landasan penelitian ini adalah kombinasi dari pendekatan diplomasi preventif oleh aktor-aktor terdepan dalam isu kemanusiaan dan pendekatan kontekstual dari krisis kemanusiaan. Meski demikian, terdapat ruang untuk mengembangkan penelitian ini agar melengkapi kepustakaan yang telah ada. Dalam literatur pertama, dokumen kebijakan ICRC tidak menjelaskan bagaimana kendala aksi pencegahan pada era kontemporer sering kali berbenturan dengan kepentingan politik. Dalam literatur kedua, kajian dari PBB terlalu fokus pada faktor pendukung kesuksesan, sehingga tantangan yang dihadapi aktor non-pemerintah tidak dieksplorasi lebih mendalam. Dalam literatur ketiga, Thomas tidak menyajikan solusi spesifik yang relevan untuk membangun pemahaman norma kemanusiaan di Sudan Selatan. Maka dari itu, terdapat kesenjangan penelitian untuk memahami secara utuh dan kontekstual terkait upaya-upaya aktor non-pemerintah dalam menghadapi tantangan diplomasi preventif dalam krisis kemanusiaan di Sudan Selatan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini disusun dengan berpedoman pada teori konstruktivisme. Konstruktivisme sebagai bagian dari paradigma reflektif HI, menekankan dimensi sosial dalam hubungan internasional dan kemungkinan adanya perubahan.⁴⁸

⁴⁸Tim Dunne dan Milja Kurki, *International Relations Theories; Discipline and Diversity*, (Oxford University Press, 2013): 188.

Konstruktivisme secara umum membahas bagaimana realitas hubungan internasional itu dibentuk atau terkonstruksi secara sosial. Ketika konstruksi sosial disusun ulang, maka besar kemungkinan realitas hubungan tersebut pun akan berubah. Konstruktivisme percaya bahwa faktor ide dan material yang dikombinasikan, membantu mengkonstruksi probabilitas baru dan menghasilkan *output* yang berbeda.⁴⁹ Maka dari itu, konstruktivisme menilai konteks sangat penting dalam memahami keutuhan persepsi. Elemen sosial budaya seperti bahasa, agama, norma, dan identitas sangat krusial untuk mendalami realitas yang ada. Berbeda dari teori arus utama yang didasarkan pada *logic of consequences*, konstruktivisme percaya bahwa pedoman subjek adalah *logic of appropriateness*.⁵⁰ Dalam hal ini berarti subjek tidak serta merta memilih untuk melakukan sesuatu karena kalkulasi konsekuensi yang menguntungkan, melainkan karena subjek tersebut merasa keputusan yang diambil lebih pantas untuk dilakukan. Menurut konstruktivisme, apabila pemahaman intersubjektif seperti *logic of consequences* tersebut terus dikonstruksi (ditanamkan) dalam kognisi masyarakat, maka masyarakat menjadi makhluk yang konformis, dan selalu menempatkan diri sesuai dengan relevansi tatanan yang dibutuhkan.

Paradigma konstruktivisme memberikan landasan yang relevan untuk mengembangkan pemahaman mengenai diplomasi preventif, khususnya dalam kasus krisis kemanusiaan di Sudan Selatan. Pertama, diplomasi berkaitan erat dengan subjek. Realitas praktik diplomasi sangat ditentukan oleh aktor yang menjalankannya,

⁴⁹ Dunne dan Kurki, op. cit., hlm. 189.

⁵⁰ Ibid., hlm. 190.

sehingga paradigma persepsional dari konstruktivisme mampu dengan baik memvalidasi potensi keragaman persepsi diplomasi tersebut. Kedua, diplomasi preventif, sesuai dengan namanya, juga sangat berkaitan dengan usaha-usaha pencegahan. Pencegahan hanya bisa dilakukan apabila subjek mengetahui apa ancaman yang diantisipasi. Kenyataannya, ancaman adalah sebuah kontestasi persepsi, maka hal tersebut sangat mungkin untuk diubah sesuai dengan konstruksi yang lebih relevan. Pada intinya, penelitian ini menekankan konstruktivisme sebagai landasan kerangka pemikiran yang hanya fokus terhadap pembentukan persepsi keadaan dan pembentukan persepsi respon yang dibutuhkan.

Dua konsep dalam penelitian ini adalah: konsep diplomasi preventif dan organisasi internasional sebagai aktor. Pertama, diplomasi preventif didefinisikan sebagai tindakan untuk mencegah timbulnya perselisihan antar aktor internasional, dan mencegah perselisihan yang telah terjadi meningkat menjadi konflik berkepanjangan.⁵¹ Esensi dari diplomasi preventif tidak hanya untuk memberi peringatan dini sebelum konflik terjadi, melainkan merespon konflik dengan cepat dan efektif, agar terhindar dari potensi kekerasan serta konflik berkepanjangan.⁵² Dalam praktiknya, banyak aktor internasional yang tidak memprioritaskan diplomasi preventif karena mereka menganggap, dengan mengabaikan potensi konflik mereka tidak dirugikan apapun.

⁵¹ United Nations, "Agenda for Peace," *UN Secretary General Report* (1992).

⁵² Alexander L. George, "Strategies for Preventive Diplomacy and Conflict Resolution: Scholarship for Policymaking," *American Political Science Association (APSA) : Political Science and Politics* Vol.33, No. 1 (2000): 15.

Namun sebenarnya tanpa mereka sadari, langkah terlambat dalam pencegahan konflik jauh lebih merugikan secara material.

Salah satu literatur krusial dalam diskursus diplomasi preventif adalah buku berjudul "*Preventive Diplomacy*," oleh Kevin M. Cahill. Literatur tersebut memaparkan diskursus diplomasi preventif secara tematis berdasarkan kasus-kasus yang dikaji secara empiris. Dimulai dari kemunculan konsep dan pendekatan, permasalahan yang sering terjadi, aktor yang sering terlibat, hingga aktor yang berpotensi ikut terjun dalam menjalankan diplomasi preventif di masa depan. Literatur oleh Cahill ini juga menjelaskan bagaimana siklus permasalahan internasional melibatkan berbagai macam disiplin ilmu. Sebagai contoh, krisis kemanusiaan akibat genosida di Rwanda, salah satunya disebabkan oleh jatuhnya harga komoditas kopi. Hal tersebut kemudian memicu kolapsnya sistem ekonomi, memunculkan gejolak sosial dan mengakibatkan *ethnic cleansing*, memproduksi banyak pengungsi, menimbulkan kelaparan serta wabah penyakit kolera dan disentri, sehingga pada akhirnya menimbulkan instabilitas regional.⁵³ Cahill berargumen bahwa fenomena tersebut menghasilkan hipotesis baru, bahwa organisasi ekonomi internasional pun memegang peran yang krusial dalam mendukung diplomasi preventif. Cakupan pembahasan yang mendalam dan sangat kontekstual dalam literatur tersebut membantu mengabstraksi diplomasi preventif sebagai bentuk penyelesaian masalah yang penuh keterkaitan dengan aktor dan konsep ilmu sosial lainnya. Pembahasan literatur ini berorientasi pada kesalahan-kesalahan pengambilan kebijakan dalam penyelesaian

⁵³ Kevin M. Cahill, *Preventive Diplomacy*, (Routledge, 2000): xiv.

konflik, yang membuat signifikansi tindakan pencegahan konflik menjadi sangat besar. Contohnya, Cahill mengkritisi bagaimana sistem ekonomi berbasis kapitalisme pasar bebas yang dianggap sebagai solusi pembangunan, justru merugikan dan menimbulkan konflik negara dunia ketiga. Dari sisi ekonomi, negara dunia ketiga sulit untuk mendapatkan distribusi dan manfaat ekonomi yang seimbang, sementara dari sisi sosial mereka semakin terfragmentasi tidak kohesif.

Secara konseptual, menurut Clive Archer, Organisasi Internasional (OI) memiliki tiga peran.⁵⁴ Pertama, OI berperan sebagai instrumen, secara umum OI didirikan dengan tujuan menjadi alat bagi negara anggota mencapai kebijakan luar negeri yang diinginkan. Kedua, OI berperan sebagai arena bagi negara anggotanya untuk berdiskusi, berargumentasi, berkooperasi, dan saling bertentangan. Ketiga, OI berperan sebagai aktor independen.

Konsep kedua yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah konsep OI sebagai aktor independen, yang meyakini bahwa eksistensi OI tidak bergantung pada faktor-faktor eksternal.⁵⁵ Menurut Archer, kapasitas OI ditentukan oleh seberapa kuat resolusi, rekomendasi, dan tatanan organnya.⁵⁶ Melihat konsep ini, dapat dimengerti bahwa organisasi internasional meski independen, membutuhkan legitimasi yang diperoleh dari anggotanya. Dalam konteks penelitian ini, Organisasi Internasional ICRC memiliki legitimasi yang lebih kuat karena keberadaannya dilindungi oleh hukum internasional berupa Konvensi Jenewa. Perlindungan hukum tersebut membuat

⁵⁴ Clive Archer, *International Organizations 3rd Edition*, (Routledge, 2001): 68.

⁵⁵ Archer, Clive., op. cit., hlm. 79.

⁵⁶ Ibid.

apapun yang dilakukan ICRC, meski secara independen, tetap merupakan hasil kesepakatan bersama antar aktor pemerintah internasional. Dalam praktiknya, keberadaan OI sebagai aktor juga diuntungkan oleh *Act State of Doctrine*, yang merupakan hukum internasional berisi pembatasan negara untuk menuntut negara lain karena setiap negara memiliki kedaulatan yang patut dihargai setinggi-tingginya.⁵⁷ OI bukanlah subjek hukum internasional, sehingga ketika suatu negara melakukan pelanggaran pada negara lain, OI bisa dimanfaatkan untuk membawa kepentingan negara yang dilanggar.

Selain teori konstruktivisme, konsep diplomasi preventif, dan konsep OI sebagai aktor independen, penelitian ini juga menggunakan satu konsep pendukung dari Samuel L. Dixon yang menjelaskan langkah-langkah bekerja sama dengan orang di dalam krisis.⁵⁸ Konsep pendukung tersebut signifikan untuk menjadi acuan dalam penelitian ini karena dalam konteks diplomasi preventif tidak ada indikator spesifik yang universal untuk menentukan secara kontras diplomasi preventif seperti apa yang dapat dikategorikan berhasil. Konsep langkah-langkah bekerja sama tersebut berfungsi untuk memandu pengkajian dalam bab analisis, agar dapat membedah relevansi diplomasi yang dilakukan oleh aktor dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sarannya. Konsep pendukung tersebut merupakan salah satu konsep dari ilmu

⁵⁷ Michael Zander, "The Act of State Doctrine," *The American Journal of International Law*, Vol. 53, No. 4 (1959): 828.

⁵⁸ Samuel L. Dixon, *Working with People in Crisis; theory and practice* (Missouri: The C.V. Mosby Company), 1979.

sosiologi yang krusial dalam mempertegas urgensi diplomasi preventif yang secara khusus dilaksanakan dalam kondisi demografis negara yang tidak stabil.

Menurut Dixon, bekerja sama dengan orang yang berada dalam krisis membutuhkan sembilan langkah. Pertama, membuat hubungan konstruktif secara intens dengan orang dalam krisis tersebut. Hubungan konstruktif tersebut dipercaya menjadi pembukaan jalan yang meringankan beban sekaligus rasa rendah diri yang harus dihadapi subjek krisis. Kedua, aktor harus mendukung subjek krisis untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Sebagian besar subjek krisis tidak hanya tertekan dari apa yang mereka hadapi, tetapi juga dari apa yang mereka rasakan. Maka dari itu, setelah mereka memahami bahwa aktor bersedia mendengarkan, subjek krisis akan lebih terbuka untuk menyampaikan dan menunjukkan apa yang mereka rasakan. Ketiga, mendiskusikan kejadian-kejadian yang dihadapi subjek krisis.⁵⁹ Tahap ini krusial dalam menanamkan fondasi yang kuat terkait bagaimana subjek krisis dapat melihat kejadian tersebut dimasa depan bukan sebagai bencana yang menghancurkan, melainkan sebagai kesempatan untuk bangkit kembali. Keempat, nilai dan evaluasi.⁶⁰ Meski hubungan antara aktor dan subjek krisis telah dimulai sejak langkah pertama, pada langkah keempat ini secara resmi aktor harus mampu menilai secara keseluruhan mengenai hal-hal yang dapat menjadi fokus dari perbaikan subjek krisis. Kelima, formulasikan penjelasan yang dinamis. Pada langkah ini subjek krisis dilibatkan secara penuh untuk memahami kembali kondisinya pada saat ini, dan upaya apa saja yang

⁵⁹ Samuel L. Dixon, *op. cit.*, hlm. 105.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 110.

dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan spesifik yang dimiliki mereka. Pada langkah ini subjek krisis akan semakin mengenal diri mereka sendiri, sekaligus meyakinkan diri mereka untuk mandiri melihat ke luar dan menempatkan diri mereka pada satu sistem. Keenam, perbaikan kognitif.⁶¹ Setelah penjelasan yang dinamis mampu melibatkan subjek krisis dan orang-orang disekitarnya, pada langkah keenam ini subjek krisis mulai mempelajari hal-hal seperti apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung perbaikan diri mereka. Ketujuh, merencanakan dan mengimplementasi perawatan.⁶² Pada langkah ini subjek krisis telah memahami bahwa ia membutuhkan sejumlah kemampuan untuk restorasi kognitif mereka, maka pada tahap ini mereka merancang dan mengimplementasikan tahapan yang spesifik untuk mendapatkan kemampuan tersebut. Kedelapan, mengakhiri hubungan.⁶³ Pada tahap ini subjek krisis sudah dinilai mampu memahami dan memperbaiki diri dari krisis yang sebelumnya mereka hadapi. Maka dari itu, penting bagi aktor untuk membatasi diri, dan membiarkan subjek krisis menyadari bahwa mereka memiliki otoritas yang sama besarnya untuk memimpin hidup mereka keluar dari krisis yang menghantui diri mereka. Kesembilan, mengikuti perkembangan terkini.⁶⁴ Pada tahap ini aktor sudah menyaksikan kemandirian subjek krisis untuk pulih, sehingga pada bagian akhir mereka hanya perlu terus mengkonsultasikan perubahan yang telah terjadi.

⁶¹ Samuel L. Dixon, *op. cit.*, hlm. 120.

⁶² *Ibid.*, hlm. 122.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 122.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 126.

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang fokus pada pendekatan eksplorasi dan pemahaman makna.⁶⁵ Berbeda dari metode penelitian kuantitatif yang bermaksud menguji teori secara objektif, penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian seperti persepsi, motivasi, perilaku, tindakan, dan aspek lainnya secara holistik; serta mendeskripsikan aspek tersebut kedalam suatu konteks khusus yang alamiah.⁶⁶ Metode kualitatif berkonsentrasi pada pemahaman fenomena secara utuh dan mendalam, sehingga menjadi metode yang relevan untuk menggambarkan dan menjelaskan rangkaian proses upaya-upaya diplomasi preventif oleh ICRC dalam krisis kemanusiaan di Sudan Selatan. Hasil penelitian dari metode kualitatif tersebut kemudian disusun kedalam bentuk penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik dari fenomena yang diteliti.⁶⁷ Melalui penelitian deskriptif, temuan dan hasil penelitian disajikan dengan penjabaran narasi yang lengkap dan koheren untuk yang menjawab pertanyaan penelitian.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan kajian audio-visual. Studi pustaka dalam penelitian ini memprioritaskan eksplorasi

⁶⁵ John W. Cresswell, *Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (Sage Publications, 2009): 179.

⁶⁶ Dr. Drs. Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, (PT Refika Aditama, 2012): 32.

⁶⁷ Hossein Nassaji, "Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis," *Language Teaching Research*, Vol. 19, No. 2 (2015): 129–132.

publikasi resmi sebagai sumber data primer. Kemudian buku, jurnal, laman berita resmi, dan laman resmi organisasi, digunakan sebagai data sekunder. Terakhir, data-data melalui kajian audio-visual akan dijadikan sumber data pelengkap, untuk memperkuat argumen yang telah dibangun oleh data primer sebelumnya. Penelitian ini akan lebih mengutamakan informasi *high-context* untuk merancang dan mengkaji variabel penelitian, serta mensintesis kesimpulan.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi ke dalam 5 bab, yang disusun sebagai berikut:

Bab 1, merupakan bab pembuka yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2, membahas ICRC serta upaya-upaya diplomasi preventifnya. Diawali dengan sejarah, legalitas dan identitas, mandat dan misi, struktur organisasi, cakupan operasional dan prioritas, pendanaan dan anggaran, serta strategi ICRC. Bagian berikutnya membahas diplomasi preventif, yang dipaparkan dari definisi dan awal kemunculan gagasan tersebut. Pembahasan bab ini juga mencakup contoh upaya-upaya diplomasi preventif yang telah dilakukan ICRC di sejumlah negara. Pemaparan bab diakhiri dengan konsep diplomasi kemanusiaan sebagai tolok ukur pencapaian ICRC dalam membentuk tindakan pencegahan.

Bab 3, membahas mengenai krisis kemanusiaan di Sudan Selatan, yang diawali dengan kondisi geografis dan demografis Sudan Selatan. Kemudian membahas mengenai latar belakang serta kronologi konflik dan kekerasan dalam perang saudara. Lalu dilanjutkan dengan pengkajian faktor utama dan faktor pendukung perang saudara tersebut, yang menyebabkan dan memperpanjang krisis kemanusiaan. Terakhir dijelaskan bagaimana konflik dan kekerasan tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat Sudan Selatan pada saat ini.

Bab 4, menganalisis upaya-upaya diplomasi preventif oleh ICRC dalam menangani krisis kemanusiaan di Sudan Selatan. Melalui bab ini akan dipaparkan tujuh tahapan yang telah dilakukan ICRC, tantangan yang harus dilalui, serta pelajaran yang diperoleh dari aplikasi upaya-upaya tersebut.

Bab 5, berisi kesimpulan penelitian.